

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Berlakunya Otonomi Daerah kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti dalam UU No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pembagian urusan pemerintah juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Dana Alokasi Umum (DAU)
- d. Dana Bagi Hasil (DBH)
- e. Pinjaman Daerah, dll...

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Madiasmo (2002) otonomi daerah yang diberikan daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Tabel 1.1.
Dana Alokasi Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No	Tahun	DAU (Juta Rupiah)
1	2010	527.471.247
2	2011	620.812.328
3	2012	757.056.696
4	2013	828.334.768
5	2014	899.923.550
JUMLAH		3.633.598.598

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Tabel 1.1. terlihat transfer dari pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun 2010 sampai 2014 terus mengalami peningkatan yang berarti bahwa kemandirian Keuangan Daerah di DIY masih belum mencukupi kebutuhan fiskal daerah yang disebabkan oleh beberapa daerah memiliki banyak penduduk miskin ataupun daerah dengan proporsi penduduk usia sekolah (6-18 tahun) tinggi. Lalu daerah-daerah dengan wilayah sangat luas, penduduk tersebar dan menanggung beban pengeluaran per kapita yang sangat tinggi untuk kontruksi dan pemeliharaan fasilitas jalan.

Prakosa (2007) mengatakan bahwa adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat tersebut bagi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai belanja daerah. Tujuan dari transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik.

Tabel 1.2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No	Tahun	PAD (Juta Rupiah)
1	2010	740.202.076
2	2011	867.112.885
3	2012	800.156.498
4	2013	1.216.102.750
5	2014	1.233.738.562
JUMLAH		4.857.312.771

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

PAD Provinsi DIY setiap tahun terus mengalami peningkatan, terlihat dalam Tabel 1.2 peningkatan PAD dari tahun ke tahun, tetapi di tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan. Akan tetapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya menuju kemandirian daerah dibuktikan dengan terus meningkatnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat yang tercermin dari perolehan DAU yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai PAD di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak yang berubah, artinya sumber utama PAD komponennya cenderung tidak banyak mengalami perubahan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), selama PAD benar-benar tidak memberikan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal maupun asing tentu tidak masalah dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan PAD yang meningkat setiap tahun mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa ketergantungan dana dari pusat.

Tabel 1.3.

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014**

No	Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
1	2010	64.678.968
2	2011	68.049.874
3	2012	71.702.449
4	2013	75.637.008
5	2014	79.557.248
JUMLAH		359.591.021

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga (ADH) Konstan tahun 2010 berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADH konstan, PDRB masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu tahun 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Provinsi DIY berdasarkan PDRB ADH Konstan dapat dilihat pada tabel 1.3. diatas. Sama halnya dengan PDRB ADH Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADH Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 1.4.
Pengeluaran Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Pengeluaran Belanja Pemerintah (Juta Rupiah)
1	2010	1.630.773.451
2	2011	1.859.142.795
3	2012	2.156.863.309
4	2013	2.454.919.429
5	2014	3.330.069.350
JUMLAH		11.431.768.334

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Tabel 1.3. menunjukkan bahwa pengeluaran belanja pemerintah daerah DIY dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kebutuhan fiskal. Pengeluaran ini bersifat fluktuatif karena terjadinya naik turun. Namun dari 2010 sampai dengan 2014 pengeluaran pemerintah daerah DIY yang paling besar terjadi pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup pesat.

Pemerintah berperan sebagai dinamisator didukung pula oleh sebuah premis yang dicanangkan dan dikampanyekan sendiri. Karena pemerintah yang merencanakan dan memodali pembangunan, maka mereka merasa paling bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dumairy (1996) kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut.

Tabel 1.5.
Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2010	3.457 491
2011	3.509 997
2012	3.552 462
2013	3.594 854
2014	3.637 116
JUMLAH	17.751 920

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Tabel 1.5. menunjukkan bahwa jumlah penduduk di DIY tiap tahunnya dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami tren yang positif, yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh kalangan mahasiswa dan para pekerja yang menetap tinggal atau hanya sementara.

Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah

Tabel 1.6.
Investasi Dalam Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2010-2014

Tahun	Investasi (Juta Rupiah)
2010	1.884.925.869
2011	2.310.271.135
2012	2.805.944.605
2013	5.203.115.642
2014	3.568.546.291
JUMLAH	15.772.803.547

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DIY

Investasi dalam negeri di DIY setiap tahun terus mengalami peningkatan, terlihat dalam Tabel 1.6 peningkatan investasi dari tahun ke tahun, tetapi di tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan. Akan tetapi tidak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam upaya menuju kemandirian daerah dibuktikan dengan terus meningkatnya ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat di setiap tahunnya. Meningkatnya investasi akan diiringi dengan meningkatnya pajak dan retribusi daerah, yang nantinya memberikan pengaruh positif untuk PAD.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY ?
2. Bagaimana pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY ?

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY ?
4. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengalisis pengaruh Faktor PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.
2. Mengalisis pengaruh Faktor Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.
3. Mengalisis pengaruh Faktor Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.
4. Mengalisis pengaruh Faktor Investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia,

selain itu penulis dapat membandingkan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instan Terkait

Penelitian ini merupakan syarat wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian yang diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisikan kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan beberapa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional variabel dan metode analisis yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Memaparkan pengujian atas dan penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta pembahasan lebih lanjut hasil penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Tentang kesimpulan serta saran dari jawaban atas rumusan masalah